

Peran Komunikasi Publik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Seruyan

Firda Carila Sari¹, Aquarini²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Palngka Raya

Corresponding Author: Firda Carila Sari, firdacarilasari@gmail.com

Published: June , 2025

ABSTRAK

Komunikasi publik menjadi sarana penting bagi DPRD dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, dan proses pengambilan keputusan, serta melibatkan masyarakat dalam kegiatan politik lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran komunikasi publik DPRD dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kabupaten Seruyan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Seruyan telah menggunakan beberapa strategi komunikasi, seperti pertemuan tatap muka, media sosial, dan media massa lokal. Namun, tingkat partisipasi masyarakat masih tergolong rendah, dipengaruhi oleh kurangnya transparansi informasi, rendahnya penggunaan media sosial secara optimal, dan rendahnya kesadaran politik masyarakat. Hambatan-hambatan tersebut mengakibatkan keterlibatan masyarakat hanya sebatas kegiatan formal, seperti Musrenbang, tanpa partisipasi yang signifikan dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan. Penelitian ini menyarankan perlunya optimalisasi komunikasi publik yang lebih dialogis, transparan, dan inklusif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses politik di DPRD Kabupaten Seruyan.

Kata Kunci: komunikasi publik, partisipasi masyarakat, DPRD, transparansi, politik lokal.

ABSTRACT

Public communication is an important means for the DPRD to convey information regarding policies, programs and decision-making processes, as well as involving the community in local political activities. This research aims to analyze the role of public communication in increasing community participation in the Seruyan Regency DPRD. This research uses a qualitative approach with in-depth interviews, observation and documentation studies. The research results show that the Seruyan Regency DPRD has used several communication strategies, such as face-to-face meetings, social media and local mass media. However, the level of public participation is still relatively low, influenced by a lack of information transparency, low optimal use of social media, and low public political awareness. These obstacles result in community involvement being limited to formal activities, such as Musrenbang, without significant participation in the legislative process and policy monitoring. This research suggests the need to optimize public communication that is more dialogical, transparent and inclusive to increase community participation in the political process in the Seruyan Regency DPRD.

Keywords: public communication, community participation, DPRD, transparency, local politics.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah, secara kont inyu dituntut masyarakat untuk memiliki kemampuan menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Tuntutan tersebut didasari atas keinginan masyarakat agar DPRD dapat memberikan perhatian, menampung dan menyalurkan

serta memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. Tuntutan-tuntutan masyarakat tersebut tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan untuk memenuhi tuntutan itu diperlukan kinerja DPRD yang nyata dan berkualitas. Peran DPRD ini juga harus mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya mendekatkan penerapan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Partisipasi adalah prinsip dimana masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran, atau dalam bentuk materiil (Ulfa et al., 2022, hal. 85).

Partisipasi masyarakat memainkan peran sentral dalam menjaga keberlanjutan demokrasi di Indonesia. Partisipasi yang aktif dari masyarakat dapat meningkatkan legitimasi pemerintah, memperkuat tuntutan hak asasi manusia, dan mendorong pertanggungjawaban dan transparansi dalam pengambilan keputusan politik. Sementara itu, partisipasi masyarakat secara langsung masih kurang, baik berupa tenaga atau kehadiran pada kegiatan yang dilaksanakan DPRD, partisipasi berupa penyampaian saran, ide atau gagasan pembangunan diwilayahnya masing-masing, serta kurangnya pemahaman yang baik akan pentingnya kegiatan untuk dihadiri sebagai bagian dari penyampaian aspirasi pada perwakilannya di pemerintahan (Thalib et al., 2023, hal. 22).

Permasalahan yang terjadi pada partisipasi masyarakat adalah peran komunikasi publik DPRD tidak selalu dianggap efektif oleh masyarakat, seperti yang terungkap dalam berbagai survey. Penyebabnya adalah masyarakat menginginkan adanya ruang dialog publik agar segera dibuka untuk mengklarifikasi hal-hal yang masih membuat bingung atau pun memberikan kepastian secara resmi. Kelemahan komunikasi publik di pemerintahan menyebabkan banyak sekali sekat-sekat yang sebetulnya tidak perlu ada. Hanya saja perlu dibuat aturan ataupun mekanisme komunikasi publik yang tersusun rapi agar masyarakat yang tidak tahu menjadi mengerti dan yang sebelumnya salah pengertian dapat memahami persoalan yang terjadi serta tertutupnya komunikasi membawa pengaruh pada hubungan kerja dengan aparat desa dan masyarakat. Permasalahan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah juga secara umum saat ini adalah tertutupnya komunikasi membawa pengaruh pada hubungan kerja dengan masyarakat. Komunikasi publik merupakan salah satu elemen penting dalam proses demokrasi, terutama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan (Farid, 2020, hal. 814).

Melihat kondisi ini tentunya perlu solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Di era modern ini, hubungan antara pemerintah dan masyarakat dituntut untuk lebih terbuka dan transparan agar masyarakat dapat lebih memahami kebijakan yang diambil serta memiliki kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan pandangannya. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai lembaga legislatif daerah memegang peran strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Oleh karena itu, komunikasi yang efektif antara DPRD dengan masyarakat menjadi

kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif. Sehingga dari konteks ini, dalam komunikasi publik DPRD harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat yang berpengaruh dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, terutama internet dan media sosial, telah membuka pintu bagi partisipasi masyarakat yang lebih luas dan demokratis dalam kehidupan politik. Teknologi ini memungkinkan masyarakat untuk dengan mudah mengakses informasi politik, berbagi pandangan mereka, dan terlibat dalam diskusi yang melibatkan isu-isu (Fitriani et al., 2023, hal. 363)

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat kabupaten Seruyan bahwa peran DPRD dalam menyampaikan informasi dan berkomunikasi dengan masyarakat memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan. Partisipasi masyarakat tidak hanya penting untuk menciptakan kebijakan yang responsif, tetapi juga untuk membangun rasa kepemilikan bersama atas keputusan yang diambil. Dalam hal ini, komunikasi publik yang tepat dapat menjadi jembatan yang menghubungkan DPRD dengan masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih terlibat aktif dalam setiap tahapan proses politik dan pembangunan.

Penelitian ini akan mengkaji bagaimana peran komunikasi publik yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Seruyan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis peran komunikasi publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di DPRD Kabupaten Seruyan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan langkah-langkah konkret untuk memperbaiki komunikasi antara DPRD dan masyarakat, sehingga tercipta pemerintahan daerah yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengkaji peran komunikasi publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di DPRD Kabupaten Seruyan. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam melalui pengumpulan data yang bersifat non-numerik dan memberikan gambaran secara rinci mengenai interaksi komunikasi antara DPRD dan masyarakat. Berikut adalah tahapan dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini:

Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggali dan mendeskripsikan peran komunikasi publik DPRD Kabupaten Seruyan dalam konteks peningkatan partisipasi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada proses komunikasi yang dilakukan oleh DPRD, strategi yang diterapkan, serta bagaimana masyarakat merespon dan berpartisipasi dalam kegiatan yang difasilitasi oleh DPRD.

Lokasi dan Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Seruyan, dengan fokus pada DPRD sebagai lembaga legislatif daerah yang bertanggung jawab dalam hal komunikasi publik dan partisipasi masyarakat. Subjek penelitian terdiri dari:

- a. Anggota DPRD Kabupaten Seruyan: Untuk memahami bagaimana komunikasi publik direncanakan dan dijalankan, serta strategi yang diterapkan oleh DPRD.
- b. Masyarakat Kabupaten Seruyan: Sebagai pihak penerima komunikasi publik dari DPRD, partisipasi masyarakat akan diukur berdasarkan keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan atau kebijakan yang dilaksanakan oleh DPRD.
- c. Staf Komunikasi dan Humas DPRD: Pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola saluran komunikasi dan interaksi dengan masyarakat.

Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang relevan dan mendalam, beberapa teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Wawancara mendalam (in-depth interview): Dilakukan terhadap anggota DPRD, staf komunikasi, dan beberapa perwakilan masyarakat. Wawancara ini bertujuan untuk menggali pemahaman terkait peran dan strategi komunikasi yang diterapkan oleh DPRD dalam mengajak masyarakat untuk berpartisipasi. Teknik ini juga digunakan untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai efektivitas komunikasi yang dilakukan oleh DPRD.
- b. Observasi: Peneliti melakukan observasi terhadap kegiatan komunikasi publik yang dilakukan oleh DPRD, seperti pertemuan publik, dialog interaktif, atau penggunaan media sosial dan media massa. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana DPRD berkomunikasi dengan masyarakat serta respons yang diberikan masyarakat terhadap komunikasi tersebut.
- c. Studi dokumentasi: Peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan komunikasi publik DPRD, seperti berita pers, laporan kegiatan DPRD, dan catatan rapat atau pertemuan publik yang melibatkan masyarakat. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk memahami lebih lanjut tentang bagaimana DPRD menyusun dan melaksanakan strategi komunikasinya.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi akan dianalisis secara kualitatif menggunakan metode analisis tematik. Tahapan dalam analisis ini meliputi:

- a. Pengumpulan data: Mengorganisasikan data yang diperoleh dari berbagai sumber (wawancara, observasi, dan dokumen).
- b. Reduksi data: Menyederhanakan, mengabstraksikan, dan mengklasifikasikan data berdasarkan tema-tema tertentu, seperti strategi komunikasi, efektivitas, dan respons masyarakat.

- c. Penyajian data: Menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk deskripsi naratif yang jelas dan sistematis, sehingga memudahkan pemahaman mengenai peran komunikasi publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.
- d. Penarikan kesimpulan: Menarik kesimpulan dari hasil analisis dengan cara menghubungkan temuan-temuan utama dengan teori dan tujuan penelitian.

Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, beberapa teknik uji kepercayaan dan validitas data digunakan, antara lain:

- a. Triangulasi sumber: Menggunakan berbagai sumber data (wawancara, observasi, dokumen) untuk memverifikasi informasi yang diperoleh dan memastikan konsistensi data.
- b. Triangulasi teknik: Membandingkan hasil yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, seperti membandingkan temuan wawancara dengan hasil observasi.
- c. Member check: Mengonfirmasi hasil wawancara dengan partisipan penelitian untuk memastikan interpretasi peneliti sesuai dengan apa yang dimaksud oleh subjek penelitian.

Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yang terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data. Selain itu, instrumen lain yang digunakan adalah panduan wawancara, panduan observasi, dan lembar analisis dokumen. Panduan wawancara akan disusun berdasarkan fokus penelitian dan teori-teori yang telah diuraikan dalam kajian teori.

Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian dimulai dengan tahapan-tahapan berikut:

- a. Persiapan: Melakukan survei awal dan koordinasi dengan DPRD Kabupaten Seruyan serta masyarakat yang akan menjadi subjek penelitian.
- b. Pengumpulan data: Melaksanakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi sesuai dengan waktu dan lokasi yang telah ditentukan.
- c. Analisis data: Mengolah dan menganalisis data yang telah terkumpul secara bertahap.
- d. Pelaporan: Menyusun laporan hasil penelitian dan menarik kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai peran komunikasi publik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di DPRD Kabupaten Seruyan, serta menghasilkan rekomendasi yang berguna untuk perbaikan komunikasi publik di masa depan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terkait peran komunikasi publik DPRD Kabupaten Seruyan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat. Berikut adalah hasil utama dari penelitian:

a. Peran dan Strategi Komunikasi Publik yang diterapkan oleh DPRD Kabupaten Seruyan

Komunikasi publik yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Seruyan adalah aktivitas yang mencakup penyebaran informasi terkait kebijakan, program, dan keputusan yang diambil oleh DPRD, serta penyediaan forum atau platform bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan tanggapan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kabupaten Seruyan menggunakan beberapa strategi komunikasi publik untuk menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat terlibat dalam proses politik. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota DPRD Kabupaten Seruyan yaitu Bapak ARAHMAN., bahwa:

“.....Menurut saya komunikasi publik dalam peran DPRD adalah komunikasi yang dilakukan dengan banyak orang atau masyarakat, bisa juga seperti bermusyawarah namun anggota DPRD lebih banyak berbicara atau lebih menyampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan. Kalau strategi komunikasi yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Seruyan seperti melakukan pertemuan tatap muka, atau menyebarkan informasi menggunakan media sosial ataupun media cetak seperti koran”.

Didukung dengan pendapat Abdu Rizal selaku staff kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan, bahwa:

“.....Komunikasi yang efektif antara DPRD dengan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang partisipatif dan inklusif. Dengan menyesuaikan kemajuan teknologi informasi dan media sosial sebagai alat fasilitas yang mendukung partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Sering digunakan untuk saluran komunikasi adalah aplikasi WhatsApp, karena media tersebut mudah digunakan dikalangan manapun. Cepat tersampaikan dari pengirim untuk pembaca, tapi kadang terbalang oleh jaringan masyarakat yang berada dipelosok”

Begitu juga dengan pendapat dari Bapak Suriansyah, beliau mengatakan bahwa:

“.....untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan dan program DPRD kadang melalui postingan Facebook, kalau saya tidak di kuala pembuang. Kadang melalui pertemuan tatap muka. Menurut saya masih belum dikatakan efektif ya, tapi sebagai pemberi informasi lebih praktis dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih cepat. Di zaman sekarang sudah jarang saya lihat masyarakat membaca koran, kebanyakan informasi yang didapatkan kalau tidak dari mulut ke mulut atau melalui telpon”.

b. Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pengambilan Keputusan

Penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Kabupaten Seruyan masih relatif rendah, meskipun sudah ada upaya dari DPRD untuk melibatkan masyarakat. Berdasarkan wawancara dan observasi, ditemukan bahwa masyarakat sering kali kurang memahami proses politik yang berlangsung di DPRD, dan ini menyebabkan partisipasi mereka terbatas pada kegiatan-kegiatan formal, seperti Musrenbang, tanpa keterlibatan yang mendalam dalam proses legislasi atau pengawasan. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Seruyan yaitu Bapak ARAHMAN., bahwa:

“.....DPRD sering mengadakan pertemuan langsung dengan masyarakat, seperti dalam kegiatan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan), kunjungan kerja, serta rapat dengar pendapat. Pertemuan ini menjadi media efektif untuk berdialog dengan masyarakat. Upaya dari DPRD untuk mendorong masyarakat adalah meningkatkan penjangkaran aspirasi masyarakat diantaranya model perorangan, melalui partai politik, kelompok sesuai dengan komisi yang diduduki, bersama-sama dengan anggota DPRD di daerah pemilihan, dan model penjangkaran aspirasi yang dilakukan bersamaan dengan kegiatan musrenbang, juga harus berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat luas”

Pendapat Abdu Rizal selaku staff kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan, bahwa:

“.....Menurut saya komunikasi public DPRD sudah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan dan program yang dirancang DPRD. Namun, komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur masih diperlukan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat. Tantangannya mungkin menghadapi respon masyarakat yang terlalu apatis belum memahami dengan benar seperti apa jalan politik dan mengajak masyarakat untuk aktif bersosialisasi dan berpendapat”

c. Hambatan dalam Komunikasi Publik DPRD Kabupaten Seruyan

Hambatan komunikasi publik yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti kurangnya transparansi dan rendahnya penggunaan media sosial, berdampak langsung pada partisipasi masyarakat. Hambatan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pengelolaan komunikasi oleh DPRD. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Seruyan yaitu Bapak ARAHMAN., bahwa:

“.....Masyarakat merasa bahwa informasi terkait kebijakan DPRD belum sepenuhnya transparan dan mudah diakses. Hal ini mencakup kurangnya penyampaian informasi yang rinci mengenai proses legislasi dan keputusan yang diambil serta pemahaman mereka terhadap politik masih kurang. Kebanyakan menggunakan Facebook dan Whats.App meskipun saya masih meanggap belum efektif dan optimal. Menggunakan media massa lokal masa kini pasti jarang dibaca untuk generasi sekarang, mungkin ada saja beberapa yang masih membaca koran”

Ditambah dengan pendapat Abdu Rizal selaku staff kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan mengatakan bahwa:

“.....Menurut saya komunikasi publik DPRD sudah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan dan program yang dirancang DPRD. Namun, komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur masih diperlukan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat. Tantangannya mungkin menghadapi respon masyarakat yang terlalu apatis belum memahami dengan benar seperti apa jalan politik dan mengajak masyarakat untuk aktif bersosialisasi dan berpendapat” Didukung dengan ungakapan Bapak Ari Kristanto, mengatakan bahwa

“.....Berdiskusi bersama masyarakat yang masih kurang memahami proses politik yang berlangsung di DPRD. Kadang kurangnya penyampaian informasi yang rinci mengenai proses legislasi dan keputusan yang diambil.

Penggunaan media sosial yang lebih intensif, serta penyampaian informasi yang lebih terbuka, dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat.”

d. Respon Masyarakat terhadap Komunikasi Publik DPRD

Masyarakat mengapresiasi upaya DPRD untuk menyampaikan informasi melalui pertemuan langsung dan media lokal. Namun, banyak masyarakat yang merasa belum cukup dilibatkan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Mereka menginginkan lebih banyak ruang untuk menyampaikan aspirasi secara aktif dan mengharapkan DPRD memberikan informasi yang lebih transparan mengenai kebijakan yang sedang dirumuskan. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota DPRD Kabupaten Seruyan yaitu Bapak ARAHMAN., bahwa:

“.....Saya pribadi berpendapat bahwa dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat ke depannya adalah kehadiran masyarakat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan dari DPRD karena pasti memiliki arti yang sangat penting, buat apa kita adakan kegiatan seperti reses atau Musrenbang kalau masyarakat saja tidak ada yang hadir. Sikap apatis masyarakat ini harus dirubah, mindsetnya harus dirubah, karena walau bagaimanapun kegiatan dari DPRD ini adalah forum masyarakat yang diharapkan akan mendapatkan masukan guna keberlanjutan pembangunan di daerah. Saya harap lebih meningkatkan lagi penyampaian informasi secara rinci dalam penggunaan media sosial oleh anggota DPRD perlu dukungan lebih dalam pengoptimalan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Kalau masyarakat untuk aktif dalam berpartisipasi dan sportif saat menyampaikan aspirasi dan bersosialisai. Diharapkan masyarakat juga memiliki sisi pemahaman dalam memberikan aspirasi dan jangan menghindar bahkan tidak paham saat mendengarkan orasi.”

Didukung dengan pendapat Abdu Rizal selaku staff kehumasan Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyan, bahwa:

“.....Melakukan pertemuan tatap muka secara rutin, penggunaan media sosial sebagai sarana yang lebih praktis untuk menyebarkan informasi dan berinteraksi dengan masyarakat secara lebih cepat. Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat yang tidak terlibat dalam pertemuan tatap muka, menyediakan akses informasi yang lebih transparan mengenai proses legislasi, keputusan kebijakan, dan forum konsultasi publik, serta Melakukan lebih banyak sosialisasi terkait pentingnya partisipasi politik dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam proses kebijakan”.

Tambahan menurut bapak Junaedi bahwa beliau mengatakan:

“.....Saya mengharapkan lebih banyak ruang untuk menyampaikan aspirasi secara aktif dan mengharapkan DPRD memberikan informasi yang lebih transparan mengenai kebijakan yang sedang dirumuskan dan masyarakat selalu terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan. Mengoptimalkan penggunaan media sosial, peningkatan transparansi informasi dan melakukan sosialisasi pendidikan politik”

PEMBAHASAN

Komunikasi Publik sebagai Jembatan antara DPRD dan Masyarakat

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi publik berperan penting sebagai jembatan antara DPRD Kabupaten Seruyan dan masyarakat. Komunikasi publik yang dilakukan melalui pertemuan tatap muka, media sosial, dan media massa lokal sudah memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kebijakan dan program yang dirancang DPRD. Namun, komunikasi yang lebih intensif dan terstruktur masih diperlukan untuk meningkatkan partisipasi yang lebih aktif dari masyarakat. Dari perspektif teori komunikasi publik yang dijelaskan oleh McQuail (2010), komunikasi yang efektif harus transparan, aksesibel, dan melibatkan interaksi dua arah. Di Kabupaten Seruyan, sebagian besar komunikasi yang dilakukan oleh DPRD masih bersifat satu arah, di mana masyarakat lebih banyak berperan sebagai penerima informasi, bukan sebagai peserta aktif dalam dialog kebijakan. Untuk mencapai keterlibatan yang lebih substansial, diperlukan mekanisme yang lebih dialogis, seperti forum daring yang memungkinkan diskusi interaktif antara DPRD dan masyarakat.

Rendahnya Partisipasi Masyarakat dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi

Temuan tentang rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik di Kabupaten Seruyan konsisten dengan penelitian terdahulu (Suyanto, 2016; Handayani, 2020), yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat seringkali dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman tentang proses politik dan minimnya akses informasi yang memadai. Di Seruyan, meskipun ada inisiatif dari DPRD untuk melibatkan masyarakat, kesadaran politik yang rendah dan terbatasnya sosialisasi kebijakan menjadi kendala utama. Menurut Arnstein's Ladder of Participation (1969), tingkat partisipasi masyarakat di Seruyan masih berada pada level konsultasi, di mana masyarakat hanya diundang untuk memberikan masukan tanpa memiliki pengaruh yang nyata terhadap keputusan akhir. Untuk meningkatkan partisipasi, DPRD perlu mendorong keterlibatan yang lebih besar di level kolaborasi, di mana masyarakat tidak hanya memberikan masukan, tetapi juga dilibatkan secara aktif dalam perumusan kebijakan.

Hambatan Komunikasi Publik dan Implikasinya

Hambatan komunikasi publik yang ditemukan dalam penelitian ini, seperti kurangnya transparansi dan rendahnya penggunaan media sosial, berdampak langsung pada partisipasi masyarakat. Hambatan ini menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam hal pengelolaan komunikasi oleh DPRD. Penggunaan media sosial yang lebih intensif, serta penyampaian informasi yang lebih terbuka, dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat, sebagaimana diungkap dalam penelitian Fitriani (2018) yang menunjukkan bahwa komunikasi digital dapat menjangkau lebih banyak warga.

Upaya Peningkatan Komunikasi Publik DPRD Kabupaten Seruyan

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa langkah perbaikan yang dapat diambil oleh DPRD Kabupaten Seruyan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat antara lain:

- a. Optimalisasi Penggunaan Media Sosial: Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk menjangkau generasi muda dan masyarakat yang tidak terlibat dalam pertemuan tatap muka.
- b. Peningkatan Transparansi Informasi: Menyediakan akses informasi yang lebih transparan mengenai proses legislasi, keputusan kebijakan, dan forum konsultasi publik.
- c. Sosialisasi Pendidikan Politik: Melakukan lebih banyak sosialisasi terkait pentingnya partisipasi politik dan bagaimana masyarakat dapat berkontribusi dalam proses kebijakan.

KESIMPULAN

Kabupaten Seruyan memainkan peran penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi Publik yang Dilakukan oleh DPRD DPRD Kabupaten Seruyan telah menerapkan berbagai strategi komunikasi publik, seperti pertemuan tatap muka, penggunaan media sosial, dan media massa lokal. Meskipun strategi ini cukup efektif dalam menyampaikan informasi, komunikasi yang dilakukan masih cenderung bersifat satu arah dan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan.
2. Tingkat Partisipasi Masyarakat Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses politik dan kebijakan di Kabupaten Seruyan masih tergolong rendah. Masyarakat umumnya hanya terlibat dalam kegiatan formal, seperti Musrenbang, tanpa partisipasi yang mendalam dalam proses legislasi dan pengawasan kebijakan. Rendahnya partisipasi ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya akses terhadap informasi yang transparan dan rendahnya kesadaran politik.
3. Hambatan dalam Komunikasi Publik Hambatan utama dalam komunikasi publik yang dilakukan oleh DPRD meliputi kurangnya transparansi informasi, rendahnya penggunaan media sosial secara optimal, serta rendahnya tingkat kesadaran politik masyarakat. Hambatan-hambatan ini menyebabkan masyarakat kurang terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPRD.
4. Upaya yang dilakukan adalah perbaikan komunikasi publik untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, DPRD Kabupaten Seruyan perlu mengoptimalkan penggunaan media sosial, meningkatkan transparansi informasi terkait kebijakan dan proses legislasi, serta melakukan sosialisasi yang lebih luas tentang pentingnya partisipasi politik. Komunikasi publik yang lebih inklusif, dialogis, dan interaktif akan mendorong masyarakat untuk lebih aktif berperan dalam proses politik di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, I. A. (2022). Peran Komunikasi Pemerintah Untuk Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Communication*, 13(1), 70. <https://doi.org/10.36080/comm.v13i1.1576>
- Arnstein, S. R. (1969). A Ladder of Citizen Participation. *Journal of the American Planning Association*, 35(4), 216-224
- Creswell, J.W. and Creswell, J.D. (2018) *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage, Los Angeles.
- Farid, A. S. (2020). Strategi Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik di Level Pemerintahan Desa. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(4), 813–820.
- Fitriani, D., Budiyan, Y., Hardika, A. R., & Mita Choerunissa. (2023). Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Demokrasi Di Indonesia: Analisis Peran Teknologi Dan Media Sosial. *ADVANCES in Social Humanities Research*, 1(4), 362–371. <https://adshr.org/index.php/vo/article/view/43>
- Fitriani, D. (2018). Efektivitas Komunikasi Publik dalam Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Kulon Progo. *Jurnal Komunikasi dan Pemerintahan*, 3(2), 55-65.
- Handayani, M. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan di Tingkat Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu Politik dan Kebijakan Publik*, 8(1), 79-92.
- Irawan, B. (2021). Model Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Kebijakan di DPRD Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Administrasi Publik*, 12(3), 45-58.
- Jannus T.H, S., & Manurung, S. (2020). Peranan Anggota DPRD Sumatera Utara Fraksi Persatuan Keadilan Bangsa Dalam Mengupayakan Aspirasi Masyarakat. *JURNAL GOVERNANCE OPINION*, 5(1), 30–40.
- Maulana, A. (2019). Pengaruh Komunikasi DPRD terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Musrenbang. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 7(4), 89-102.
- McQuail, D. (2010). *McQuail's Mass Communication Theory* (6th ed.). London: Sage Publications.
- Mucharam, A. (2022). Membangun Komunikasi Publik Yang Efektif. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 27(1), 71–82.
- Nurhadi, A. (2015). Peran Komunikasi Publik dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Pemerintahan Daerah. *Jurnal Komunikasi Sosial*, 2(1), 22-35.
- Permini, N. L. P. E., & Atmaja, I. M. W. K. (2022). PERAN HUMAS DALAM KEGIATAN PUBLIKASI ONLINE. *Jurnal Moderat*, 8(3), 620–632.
- Ramadhan, H. (2017). Peran DPRD dalam Mendorong Partisipasi Masyarakat melalui Komunikasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 113-125.
- Suyanto, R. (2016). Partisipasi Masyarakat dalam Proses Legislasi di DPRD Kota Bandung. *Jurnal Demokrasi Lokal*, 4(1), 33-48.
- Susanto, A., & Rachman, S. (2019). Pemanfaatan Media Sosial oleh DPRD dalam Komunikasi Publik. *Jurnal Media dan Komunikasi Politik*, 9(3), 59-70.
- Syarifuddin, S., Rahmat, M. R., & Mustanir, A. (2024). Model Komunikasi Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(3), 67–68.
- Thalib, H., Nusi, M., & Razak, D. A. (2023). Partisipasi Masyarakat Pada Pelaksanaan Reses Anggota DPRD Fraksi Partai Amanat Nasional Kota Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu pemerintahan*, 02(1), 19–32.
- Ulfa, Mus, A. R., Subhan, Abduh, M., & Wahyuni, N. (2022). Pengaruh Akuntabilitas Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengelolaan Keuangan Pada Kantor DPRD Kabupaten Enrekang. *Paradoks : Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(2), 84–91. <https://doi.org/10.57178/paradoks.v5i2.335>.
- Wardani, M. S., Basyar, B., & Wahyuni, S. (2023). Pengaruh Komunikasi dan Partisipasi Masyarakat terhadap Program Bersinergi Mambangun Nagari di Kota Padang - Sumatera Barat. *Warta ISKI*, 6(1), 87–93.